

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jogja Independent (JOINT) merupakan sebuah gerakan sosial yang pertama kali di Kota Yogyakarta dan di Indonesia yang melakukan sebuah proses kandidasi calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Kerelawanan menjadi pondasi gerak komunitas ini. Ada empat tahapan metode kandidasi yang dilakukan oleh JOINT yakni penominasian calon, pemilihan penyeleksi, forum uji kandidat, dan penetapan kandidat.

Dalam penominasian calon, setiap warga negara Indonesia berhak mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon walikota melalui jalur independen yang dilakukan oleh JOINT. Calon-calun tersebut hanya diminta untuk menyerahkan riwayat kehidupan, visi dan misi tanpa membatasi apa pekerjaan serta tanpa dipungut biaya seperti yang sering terjadi di partai politik.

Dalam pemilihan penyeleksi, JOINT memilih beberapa orang yang berkompetensi dan berintegritas serta mau bekerja secara sukarela menjadi tim penyeleksi yang akan melaksanakan tugas uji bakal calon. Namun, pemilihan atau penunjukkan para penyeleksi ini tidak melibatkan seluruh elemen yang bergabung di dalam JOINT.

Dalam forum uji, JOINT membagi beberapa tahap forum yang harus dilalui oleh masing-masing bakal calon. Tahap uji publik tahap I, pra konvensi, uji publik tahap II, dan konvensi. Di forum uji ini, masyarakat dan ormas dilibatkan untuk memilih dan melakukan pemungutan suara. Namun, masih ada elemen relawan (kumpulan mahasiswa) yang tidak dilibatkan pada proses penetapan calon. Dalam forum penetapan kandidat, bakal calon yang dipilih atau ditetapkan menjadi kandidat adalah proses hasil penghitungan suara pemilihan yang dilakukan oleh ketua RW, ormas dan masyarakat umum serta tim penyeleksi.

Teori kandidasi Rahat dan Hazan (2013) hanya menjelaskan pengklasifikasian proses kandidasi. Teori ini tidak menjelaskan apakah proses kandidasi yang demokratis dan inklusif lebih baik dibandingkan proses kandidasi yang totaliter dan eksklusif.

Di JOINT, terdapat praktik-praktik kandidasi yang totaliter dan eksklusif. Namun, praktik tersebut menjadi baik karena keterbatasan sumber daya manusia dan waktu sehingga JOINT mampu melaksanakan proses-proses kandidasi yang terbuka.

Kandidasi yang berjalan demokratis tidak menjamin sebuah komunitas yang merupakan antitesa dari buruknya kandidasi partai politik dapat bertahan dan bersaing dengan partai politik. Beberapa faktor kegagalan JOINT antara lain (1) ruang demokrasi yang tidak terbuka di antara masing-masing relawan (2) metode

pendekatan yang tidak efektif oleh JOINT terhadap masyarakat (3) disahkannya undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang sangat memberatkan syarat calon persorangan untuk mendaftarkan diri ke KPUD (4) adanya kampanye hitam (*black campaign*) yang ditujukan kepada Garin, membuat elektabilitas JOINT semakin menurun di masyarakat (5) calon yang terpilih tidak memiliki strategi yang baik dalam mencari pendukung, berkomunikasi dengan masyarakat serta dengan para relawan yang tergabung di JOINT (6) sumber daya keuangan yang tidak ada untuk melakukan mobilisasi di lapangan serta administrasi di sekretariat.

B. Rekomendasi

Penelitian ini merupakan penelitian pertama mengenai proses kandidasi calon perseorangan yang dilakukan oleh masyarakat biasa. JOINT sendiri merupakan komunitas yang mencoba membuat gerakan baru untuk bertarung di pentas politik dengan menggunakan konsep kerelawanan.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam penelitian selanjutnya yakni mengenai cara kerja JOINT sebagai gerakan kerelawanan, bagaimana pola-pola hubungan yang dibangun antar relawan. Kemudian dengan masyarakat.

Kemudian, penelitian untuk mengetahui faktor-faktor gagalnya gerakan JOINT sendiri. Ini menjadi penting karena sebuah gerakan masyarakat yang melahirkan proses dan pembelajaran yang demokratis bagi masyarakat. Tapi bisa “mati” dan “mati” di Kota Yogyakarta yang menjadi salah satu kota pendidikan di

Indonesia. Kedua penelitian di atas sangat relevan untuk diteliti sebagai antitesis di tengah carut marutnya politik serta buruknya kinerja partai politik di Indonesia.